

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu ekonomi kerakyatan beberapa dekade ini kembali menyeruak di tengah-tengah menggeliatnya usaha pemerintah dalam menggerakkan pelaku UMKM untuk menggenjot sektor riil negara dengan basis usaha masyarakat menengah ke bawah. Melalui beberapa kebijakannya negara hadir dengan isu melindungi serta mendorong mereka untuk terus dan selalu mengembangkan diri serta mampu bersaing dengan produk-produk perusahaan terkenal baik secara nasional ataupun internasional. Produk makanan-minuman lokal, kerajinan, obyek wisata dan hal-hal yang bersifat kearifan lokal digenjot melalui beberapa regulasi dan program pendanaan yang bersifat lunak. Di era sekarang sebagai bentuk penguatan UMKM, pemerintah mendorong para pelakunya menjadi anggota koperasi dan sebaliknya anggota koperasi didorong untuk menjadi pelaku usaha agar mampu memperkuat perekonomian yang berdaya saing dan berorientasi pada ekspor. Statistik jumlah koperasi besar di Indonesia mencapai 0,03 persen lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen. Begitupun dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun telah disiapkan oleh Kemenkop & UMKM untuk koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi.²

²Tim Editor, “Refleksi Hari Jadi Koperasi ke-73 Tahun 2020”, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=200714080350eyK0tE53Iq>.

Hal ini dilakukan karena pemerintah merasa yakin bahwa negara tidak bisa meninggalkan peran dan kontribusi mereka, para pelaku usaha menengah, kecil dan mikro untuk bersama-sama terlibat dalam memajukan ekonomi negara, meskipun sebenarnya gerakan ini oleh sebagian orang dinilai hanyalah bersifat sesaat, tidak terkonsep secara rapi dan berkesinambungan serta cepat berganti isu atau kalau tidak mau dibilang pencitraan dari sang pemimpin yang terpilih sebagaimana program-program di masa lalu.

Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tepatnya di era orde lama di mana koperasi³ dijadikan salah satu fokus unggulan pemerintah di masa itu. Koperasi yang dianggap sebagai lembaga yang mempunyai semangat ekonomi kerakyatan sekaligus sebagai organisasi yang mampu mengorganisir segenap potensi anggota dan sikap kemandirian ternyata ibarat pepatah “jauh panggang dari api”.⁴ Seiring perkembangan zaman keberadaan lembaga ini juga tidak lagi populis. Ia dianggap ketinggalan zaman dan tidak adaptif serta kalah bersaing dengan toko ritel dan supermarket yang tersedia 24 jam atau lembaga jasa keuangan lainnya yang aktif

³ Menurut UU No 25 Tahun 1992, “Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkoperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. Adapun prinsip-prinsip dasar koperasi meliputi: koperasi sebagai badan usaha, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, asas kekeluargaan dan prinsip koperasi (Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka), Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis, Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, Pendidikan Perkoperasian dan Kerja sama antar koperasi). Lihat Sugiharsono, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta, Direktorat PSMP DEPDKNAS), 9

⁴ Secara kuantitatif, jumlah koperasi di Indonesia dari tahun ketahun meningkat cukup fantastis. Pada tahun 2001 jumlah koperasi tercatat 110.776, meningkat pada akhir tahun 2005 menjadi 123.191 buah. Peningkatan serupa terlihat juga pada jumlah anggota di tahun 2001 sebanyak 23.644.850 orang, menjadi 27.283.678 orang pada tahun 2005. Akan tetapi peningkatan jumlah anggota ternyata tidak disertai dengan peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jumlah SHU menurun dratis dari tahun 2001 sejumlah Rp.3.134.446,41 juta menjadi 1.871.926,70 juta per Juli 2005. Jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT juga hanya sepertiga dari koperasi yang ada. Peningkatan juga terjadi pada jumlah koperasi yang tidak aktif, di mana pada tahun 2001 jumlah koperasi yang tidak aktif tercatat 21.010 (8,89%) dari jumlah koperasi yang ada dan tahun 2005 meningkat menjadi 29.381 (10,76%). Apabila dibandingkan dengan sektor usaha lain (BUMN dan BUMS), keberadaan koperasi masih jauh tertinggal. Pada tahun 2003, nilai aset BUMN sebesar 53,8%, BUMS 45,4 % dan koperasi hanya 0,8 %. Nilai usaha BUMN 34,3%, BUMS 61,7% dan Koperasianya 4,0%. Badan Pusat Statistik, “Tabel Perkembangan Koperasi pada Periode 1967-2015”, dalam <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1321/tabel-perkembangan-koperasi-pada-periode-1967--2015.html>

dalam menjaring konsumen dan atau calon nasabah. Sebuah lembaga yang mengemban tugas mulia dalam menjaga relasi-relasi sosial dan kemandirian sebuah masyarakat atau bahkan bangsa. Hal yang hampir tidak pernah ditemukan dalam badan usaha yang berbentuk Firma, CV ataupun PT padahal dimasa orde lama koperasi menjadi salah satu konsen garapan negara bahkan sampai diperlukan adanya kementerian tersendiri.

Koperasi yang dikenal sebagai suatu perkumpulan orang yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan⁵, menandakan bahwa di dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Artinya, sebagai suatu bentuk wadah organisasi ekonomi kerakyatan maka koperasi sudah semestinya harus berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya.⁶ Dengan demikian bisa dikatakan bahwa koperasi adalah sebuah pengejawantahan dari ekonomi kerakyatan dalam bentuk perkumpulan, lembaga usaha yang berbadan hukum.

Kemunculan koperasi sebagai sebuah organisasi yang mencita-citakan tumbuhnya jiwa kemandirian dan penuh keberpihakan kepada kondisi ekonomi rakyat secara mayoritas padahal memiliki sejarah panjang dan menghiasi sejarah awal kemerdekaan serta berdirinya Negara Indonesia. Keberadaannya saat itu tidak bisa

⁵Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia)*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 103.

⁶Dalam wacana sistem ekonomi dunia, koperasi disebut juga sebagai “*The Third Way*” atau “Jalan Ke Tiga”, oleh Sosiolog Inggris Anthony Giddens, istilah tersebut akhir-akhir ini dikenal sebagai “Jalan tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme”. Dawam Rahardjo “Apa Kabar...

dilepaskan dari pergulatan kondisi dunia yang terjadi di era 1930-an, di mana sistem kapitalis⁷ mulai tergerus dan kemapanannya dipertanyakan kembali oleh mereka yang tidak puas akan nilai-nilai madzab ini justru muncul dan berkembang luas di negara-negara Eropa, tempat asal usul di mana sistem kapitalis itu sendiri muncul.

Tawaran dari paham sistem sosialis yang mencita-citakan bahwa kemakmuran harus bisa dinikmati oleh semua golongan, tidak adanya lagi perbedaan kelas⁸, semuanya harus sama rasa dan sama rata, begitu menghipnotis banyak tokoh di dunia utamanya di negara-negara yang di jajah saat itu. Semangat untuk bisa melepaskan diri dari kungkungan kolonialisme, imperialisme sebagai bagian dari buah kapitalisme serta usaha untuk membangun sikap kemandirian suatu bangsa begitu menggelora sebagai bentuk perlawanan terhadap situasi yang banyak terjadi di negara-negara terjajah. Seakan-akan ke dua madzab ini saling berebut tempat dalam percaturan belahan dunia di masa tersebut.⁹

⁷Sistem yang disandarkan pada diri Adam Smith (1723-1790), seorang ekonom berkebangsaan Inggris ini muncul untuk menyelesaikan permasalahan tentang kebutuhan hidup manusia yang sifatnya tidak terbatas. Kapitalisme muncul untuk mengkritik dua paham sebelumnya, Merchantilisme dan Physiokrat. Semangat individu untuk mengumpulkan kekayaan tanpa dibatasi kekuasaan negara diyakini menjadi proses penjaheraan. Semangat liberalisme menjadi ruh dari sistem ini. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 27

⁸Sistem ini merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat ini terdapat dalam buku Das Capitalnya Karl Marx. Dalam sistem ini semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki banyak kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan ekonomi seperti *what*, *how* dan *for whom* semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Karena seperti itu maka semua alat-alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Lihat dalam, Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1967), 12.

⁹Pada praktiknya, kedua mazhab ini mempunyai ciri khas yang sangat berbeda dan begitu fundamental, mazhab kapitalisme menekankan tidak adanya intervensi negara dalam hal perekonomian, negara hanyalah sebuah fasilitator untuk memberikan suasana kondusif bagi sektor-sektor swasta untuk menjalankan roda perekonomian. Sedangkan mazhab sosialisme, yang bisa dibilang merupakan kebalikan dari mazhab kapitalisme, menekankan bahwa perekonomian suatu negara hanya boleh diatur pemerintah. Berbeda dengan mazhab kapitalisme, yang sangat mengakui hak milik pribadi, mazhab sosialisme sangat membatasi hak milik individu bahkan cenderung meniadakan hak milik tersebut dan hanya mengakui kepemilikan bersama (*community*). Aliran sosialisme yang meniadakan hak individu inilah yang sampai saat ini kenal dengan aliran komunisme, yang mana pada praktiknya aliran komunisme ini lebih ekstrem daripada aliran sosialisme. Kedua mazhab ini menawarkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada dunia dan saling berebut pengaruh dan mengklaim satu sama lain bahwa mazhab mereka masing-masinglah paling benar dan paling ampuh dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, inflansi dan lain-lain sebagainya. Dan tak jarang dalam mengkampanyekan ide-ide tersebut kedua mazhab ini harus berhadapan satu sama lain dalam posisi diametral, bahkan sampai meruncing, dan merembet kemasalah politik hingga konflik. Baca Euis

Istilah “ekonomi rakyat” pertama kali dikenalkan oleh Moh. Hatta melalui artikelnya yang berjudul “Pengaruh Kolonial Kapital di Indonesia”¹⁰ dan selanjutnya di susul artikel “Ekonomi Ra’jat”¹¹ dan “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja”¹² yang menjelaskan sikap Moh. Hatta atas kondisi dan situasi ekonomi rakyat yang terjadi ketika itu. Kepedulian dan keterpihakannya atas situasi yang terjadi pada saat itu bukan hanya ditunjukkan melalui ucapan-ucapan prihatin dan simpati pada saat Hatta berada diatas podium ataupun forum saja tetapi juga bisa ditangkap dari banyak tulisan dan karya Hatta yang bersifat analisis deskriptif serta dilengkapi oleh pembahasan teoritis yang mendalam menurut sudut pandang keilmuan terhadap kondisi ekonomi rakyat di masa itu. Artinya saat menuliskan artikel-artikel tersebut bukan hanya pribadi manusia Hatta yang prihatin terhadap nasib rakyat kecil bangsanya, melainkan juga manusia Hatta sebagai seorang ilmuwan yang serius memeriksa persoalan-persoalan keilmuan dibalik persoalan ekonomi riil yang sedang menghimpit bangsanya, termasuk berbagai pemecahannya. Sehingga anggapan yang menyatakan bahwa Sarbini ataupun Mubyarto adalah orang pertama yang mempopulerkan istilah itu adalah pernyataan yang perlu dipertanyakan kembali.¹³

Hatta ketika itu juga sangat serius mendalami kaitan depresi ekonomi dunia dengan kapitalisme. Ia tak hanya menulis artikel-artikel pendek untuk mengkaji persoalan tersebut. Pada 1934, Hatta menulis sebuah buku untuk menggambarkan dampak krisis ekonomi terhadap nasib kaum buruh, tani, pedagang kecil, dan

Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Astaarus Jakarta, 2005), 21-22.

¹⁰Mohammad Hatta, “Pengaruh Kolonial Kapital di Indonesia”, dimuat dalam Majalah *Daulat Ra’jat*, No. 7/I, 20 November 1931.

¹¹Mohammad Hatta, “Ekonomi Ra’jat”, dimuat dalam Majalah *Daulat Ra’jat*, No. 79/III, 20 November 1933.

¹²Mohammad Hatta, “Ekonomi Ra’jat dalam Bahaja”, dimuat dalam Majalah *Daulat Ra’jat*, No. 84/IV, 10 Januari 1934.

¹³Penjelasan lengkap lihat Fadli Zon “Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926 – 1959)”, Disertasi UI, (Depok, 2016), 8-9.

perekonomian rakyat secara umum, dilengkapi sebuah tinjauan sejarah mendalam atas krisis yang terjadi sepanjang sejarah kapitalisme. Buku itu dipersiapkan cukup lama. Sejak Majalah *Daulat Ra'jat* No. 75/III, yang terbit 10 Oktober 1933, buku *Krisis Ekonomi dan Kapitalisme* telah diiklankan sebagai “sedikit waktoe lagi akan terbit”. Namun kenyataannya buku itu baru terbit Agustus tahun berikutnya, 1934. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, pembahasan Hatta mengenai ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan selain bersifat *populis* juga dimaksudkan sebagai analisis keilmuan *teoritis*.¹⁴

Hatta mengimpikan terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa Indonesia melalui konsep ekonomi kerakyatannya sehingga muncullah koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang digali dari karakter asli bangsa dan masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat gotong royong, suka saling membantu, peduli atas orang lain, tidak apatis, tidak mudah menyerah dan penuh dengan nilai moral.¹⁵ Sebuah nilai dan karakter yang sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Sehingga slogan “Dari Anggota, Oleh Anggota dan Untuk Anggota”, diyakini mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada saat itu dan sampai saat ini, sebagaimana yang dicita-citakan oleh si penggagasnya, yaitu Mohammad Hatta.

Di fase awal pasca kemerdekaan tantangan perekonomian di Indonesia dihadapkan antara paham nasionalisme dan komunisme. Benturan antara dua paham ini menjadi satu tantangan tersendiri dalam dinamika perekonomian di Indonesia. Salah satu tokoh terpenting dalam merespon kedua paham tersebut adalah Mohamad Hatta sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Model kepemimpinan Hatta yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bung Hatta pada intinya mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan perekonomian rakyat Indonesia dibawah tindasan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga yang dimaksud dengan ekonomi rakyat dan perekonomian rakyat itu tentu tidak lain adalah ekonomi pribumi atau penduduk asli Indonesia. Lihat Surat Kabar *Daulat Rakyat*, tanggal 20 November 1933.

moderat menunjukkan bahwa perhatian Hatta terhadap pasal 33 UUD 1945 yang menuntut untuk diselenggarakannya perekonomian nasional atas dasar kekeluargaan. Dalam aktualisasinya, Hatta berpedoman pada sikap anti kapitalis dan berupaya untuk menciptakan sistem ekonomi kerakyatan sebagai lambang untuk menuju pemerataan ekonomi dan masyarakat tanpa kelas. Dalam pemikirannya, Hatta menganggap bahwa ekonomi kerakyatan sebagai tiang utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.¹⁶

Mohammad Hatta, sang pencetus Ekonomi Kerakyatan¹⁷ sekaligus Bapak Koperasi dan seorang tokoh *the founding father* negara yang meskipun mendapatkan pendidikan sekolah barat dan administrator negara, tetapi sifat religious dan pemahaman ilmu agamanya sangat kuat dan kental dalam kehidupan sehari-harinya.

“Untuk memerangi kapitalisme yang terus merajalela, maka berjumpalah cita-cita sosial-demokrasi barat dengan sosialisme Islam di atas bumi Indonesia. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme sebagai pandangan hidup yang berdasarkan materialisme, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri. Bagi mereka sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil makmur, bebas dari segala tindasan”.¹⁸

Hatta mengimpikan terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa Indonesia melalui konsep ekonomi kerakyatannya. Sehingga muncullah konsep ekonomi koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang digali dari karakter asli bangsa

¹⁶ Benjamin Higgins, “Hatta and Co-operatives: The Middle Way for Indonesia?”, *The Annals Of The American Academy Of Political and Social Science*, 1 Juli 1958. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000271625831800108>

¹⁷Hatta pernah mengungkapkan ide ekonomi yang berdasarkan kerakyatan antara lain: “perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksudkan akan mematikan perusahaan yang kecil-kecil yang hanya dapat dikerjakan oleh orang-seorang saja dan tiada menyinggung keperluan umum. Usaha bersama dilakukan terhadap kepada penghasilan yang benar-benar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Disentralisasi ekonomi dilakukan dengan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Jadinya Indonesia ibarat satu taman yang berisi suatu pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak. Jadinya, bukan koperasi yang bersaing satu sama lain mencari untung besar, melainkan yang bekerja bersama-sama untuk membela kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran, seni dan lain-lain”. Lihat Swasono, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), 201

¹⁸Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia...*,14.

dan masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat gotong royong, suka saling membantu, peduli atas orang lain, tidak apatis, tidak mudah menyerah dan penuh dengan nilai moral.¹⁹ Sebuah nilai dan karakter yang sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Sehingga slogan “Dari Anggota, Oleh Anggota dan Untuk Anggota”, diyakini mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada saat itu dan sampai saat ini, sebagaimana yang dicita-citakan oleh si penggagasnya, yaitu Mohammad Hatta.

Dengan demikian kiranya menjadi penting oleh seluruh pihak untuk mengupayakan terwujudnya kemandirian ekonomi bangsa Indonesia melalui berbagai sektor ekonomi riil dan program-programnya. Salah satunya adalah mengenal, memahami sejarah kemunculan dan aktualisasi pemikiran ekonomi kerakatan Mohammad Hatta dalam transformasi pembangunan ekonomi nasional.

Disisi lainnya, agama Islam melalui syariat dan praktek-praktek muamalahnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para penerusnya secara gamblang telah menyatakan bahwa kebolehan atas semua aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi cara-cara untuk mendapatkan keuntungan dan penggunaan atas keuntungan tersebut diatur oleh Islam, termasuk didalamnya adalah tidak mengeksploitasi pihak lainnya atau memanfaatkan yang lemah untuk mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok.

Islam secara formal mengakui kebebasan berusaha dengan lembaga kepemilikan pribadi, sistem pemasaran dan keuntungan. Dengan cara pandang yang demikian Islam mensyaratkan kepemilikan pribadi tidak semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga harus berfungsi sosial. Kepemilikan

¹⁹Bung Hatta pada intinya mengungkapkan kekusarannya menyaksikan kemerosotan perekonomian rakyat Indonesia dibawah tindasan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga yang dimaksud dengan ekonomi rakyat dan perekonomian rakyat itu tentu tidak lain adalah ekonomi pribumi atau penduduk asli Indonesia. Lihat Surat Kabar *Daulat Rakyat*, tanggal 20 November 1933.

tidak hanya bergulir dalam rotasi kelompok kaya dan pemilik modal saja, tetapi alur distribusinya juga harus merambah ke kalangan miskin dan lemah. Kecenderungan monopolistik dan kapitalistik tidak dibenarkan dalam Islam karena hal itu akan berimplikasi pada perampasan hak orang-orang miskin, seperti menumpuk harta, kikir, dan penguasaan sumber ekonomi oleh kelompok kecil masyarakat²⁰

Inilah yang dinyatakan bahwa tujuan akhir dari nilai Islam tentang ekonomi adalah untuk mendapatkan *falah* (kebahagiaan) dan *maslahah* (kebaikan). Bukan dengan cara mengeksploitasi yang lemah atau mendapatkan keuntungan dengan sangat mudah dan tidak mengenal resiko sebagaimana hal ini tergambar pada bunga/riba. Nilai-nilai inilah yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan, sebuah cita-cita luhur yang diimpikan oleh si pendirinya, yaitu Mohammad Hatta bahwa sosialisme dalam Islam adalah sosialisme ketuhanan. Seperti yang dikatakan Bung Hatta bahwa etika agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pandangan hidup. Pada tataran praktis, melaksanakan bayangan kerajaan Allah di atas dunia adalah tujuannya.²¹

Selanjutnya berkaitan dengan isu tentang adanya perdebatan tentang Islamisasi ilmu di kalangan intelektual Muslim yang dipicu oleh persoalan relevansi antara Islam, sains dan modernitas telah menimbulkan kontroversi besar.²² Kontroversi ini tidak saja berkisar pada pertanyaan dalam tataran intelektual, tetapi juga politis. Pertanyaan yang muncul pada wilayah politis adalah model apa yang akan diadopsi Islam: apakah modernisme bergaya Barat, radikalisme Islam atau reformisme sebagai jalan tengah?. Hal ini pulalah yang telah di lihat sebagai pengaruh pemahaman dan jati diri kemusliman Moh. Hatta terhadap nilai-nilai agama merambah dan

²⁰Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 109.

²¹Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia...*, 1.

²² Hilman, Latief, "Membangun Koherensi Antar Sektor: Filantropi Islam, Agenda Organisasi Sektor Ketiga dan Masyarakat Sipil di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Nomor 1, 2008.

mempengaruhi terhadap kemunculan konsep ekonomi kerakyatan.²³ Tentu saja Hatta diyakini tidak akan menutup mata terhadap situasi sosial dan politik dalam negeri dan luar negeri saat itu. Disinilah terlihat jelas kemampuan Hatta dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama.

Dalam mempraktekkan Islam, Bung Hatta berkeyakinan bahwa nilai dan norma Islam dapat diterima oleh golongan manapun asalkan tidak disampaikan dalam formalisme dan simbol keislaman. Sehingga sebagian tokoh mengklaim bahwa Bung Hatta adalah seorang yang “sekuler” dan banyak juga yang mengatakan Bung Hatta ialah tokoh yang nasionalis religius. Sehingga perlu ada penelusuran tentang keislaman beliau lebih dalam.

Perdebatan Islamisasi ilmu selama beberapa dekade terakhir ini pada hakekatnya adalah upaya meneruskan pembaharuan Islam yang sudah diusung sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perdebatan itu merupakan kelanjutan perdebatan tentang Islam dan modernisme antara Muslim sekuler, Islam modernis, dan ulama tradisional. Muslim sekuler berusaha untuk menempatkan Islam pada wilayah moral dan bersifat individu dengan menyeru untuk mengikuti sains, teknologi dan model politik Barat. Kelompok tradisional, sebaliknya, berusaha untuk menjauh dari Barat dengan kembali kepada masyarakat Islam masa Nabi Muhammad. Di tengah-tengah kedua kelompok tersebut antara kelompok sekuler ekstrem dan tradisioalis ekstrem muncul kelompok ketiga, yaitu Islam modernis.

Islam modernis menyuarakan sejumlah tema. *Pertama*, mereka menegaskan keutamaan dan keunggulan sumber utama Islam al-Qur'an di atas sumber lainnya. *Kedua*, mereka berusaha untuk menegakkan kembali praktik *ijtihad* dan menghapus *taqlid*. *Ketiga*, kelompok Islam modernis berpendapat bahwa Islam senantiasa relevan

²³Baca Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), 1980).

dengan dunia modern, dan mereka menyeru untuk melakukan asimilasi antara prinsip universal Islam dengan sains dan teknologi Barat. Mereka tidak menolak Barat dan tidak menempatkan Islam hanya menjadi wilayah personal dan wilayah moral seperti halnya Muslim sekuler. *Keempat*, Islam modernis menegaskan, sebagaimana kelompok tradisional, Islam adalah agama yang sempurna.²⁴

Untuk itulah penting kiranya memunculkan kembali semangat baru untuk bersama-sama mewujudkan jiwa kemandirian, saling membantu, bekerjasama dan tidak mudah menyerah sebagaimana tergambar dalam semangat ekonomi kerakyatan Hatta. Menjadi penting kiranya untuk diupayakan kembali di dalam transformasi pengembangan ekonomi nasional pada masa sekarang. Hal ini juga sejalan dengan tulisan Sritua yang berusaha mengungkap kembali tentang pentingnya generasi penerus untuk mengenal kembali tentang sejarah ekonomi Indonesia dan terwujudnya cita-cita keadilan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan.²⁵ Hal senada juga dinyatakan oleh Pohan bahwa Mohammad Hatta yang dikenal sebagai salah seorang ‘Dwi Tunggal’ Bapak Proklamator Republik Indonesia yang memiliki gagasan atau konsep perekonomian yang penting bagi Indonesia. Munculnya istilah demokrasi ekonomi dan ekonomi kerakyatan yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Gotong royong yang merupakan intisari dari Pancasila menjadi mesin utama dalam implementasi ekonomi kerakyatan sebagai salah satu gagasan dalam transformasi pengembangan ekonomi nasional.²⁶

²⁴Ahmad Rizqon Khamami, *Hubungan Sains dan Islam dalam Perspektif Fethullah Gullen (Islamisasi Ilmu dalam Praktik)*, Disertasi S3 IAIN Surabaya, 2014, 6.

²⁵Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta...*

²⁶Ibnu Asqori Pohan, Aylia Eka Krisdayanti, Dakka Bangun Simanjuntak, “Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta”, *Journal Ilmu Politik & Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 1, 2018.

Selanjutnya, kebaikan dan nilai-nilai positif dari sistem ekonomi sosialis (meskipun sudah tidak lagi populer untuk dipraktekkan) serta hadirnya nilai-nilai agama melalui nilai Islam tentang ekonomi yang melihat bahwa segala sesuatu bukanlah bersifat *value free*, tetapi justru *non-value free* harus dihadirkan kembali sebagai satu kesatuan utuh (integrasi) dalam gerak dan pengelolaan. Keberpihakan dan partisipasi adalah kunci utama dalam upaya pendayagunaan di sektor ekonomi yang berbasis nilai-nilai ekonomi kerakyatan sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Anwar Abbas.²⁷ Sehingga menurut Fadli Zon gagasan tentang ekonomi kerakyatan masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini. Menurutnya, Bung Hatta memandang bagaimana rakyat menjadi pusat ekonomi atau *people center economy*. Bukan sekedar pembangunan, infrastruktur tetapi bagaimana ekonomi rakyat meningkatkan gagasan ekonomi.²⁸ Bahkan dalam kajian lain dinyatakan bahwa hasil uji coba kelompok kecil, uji coba terbatas dan uji coba kelompok besar menunjukkan bahwa model pembelajaran inkuiri terintegrasi dengan nilai pemikiran ekonomi Mohammad Hatta terbukti efektif dan sesuai dengan analisis kebutuhan.²⁹

Sejauh ini telah ada karya-karya terkait Moh. Hatta yang telah ditulis oleh berapa tokoh. Diantaranya adalah *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*,³⁰ sebuah buku kumpulan karangan yang sebagian besarnya berasal dari *Annual Memorial Lecture* di Universitas Bung Hatta dari tahun 1989 hingga 1993. Meskipun buku ini membahas tentang pokok-pokok pemikiran ekonomi Moh. Hatta namun karena berbentuk bunga rampai dan ditulis oleh banyak orang sehingga terlalu ringkas untuk

²⁷Anwar Abbas berusaha menjelaskan falsafah dan cita-cita sosial ekonomi, nilai-nilai dasar dan instrumental ekonomi serta globalisasi alamnya dan dinamika ekonomi bangsa. Lihat *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).

²⁸Fadli Zon, *Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Jalan Politik Kemakmuran Indoensia* (Jakarta: Fadli Zon Library, 2016).

²⁹Bangun Utama Winata, Sunardi, Djono, "Development of an Integrated Inquiry Model the Value of Thought Economy of Mohammad Hatta in Social Studies Subject", *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, Volume 3, Nomor 2, May 2020.

³⁰Universitas Bung Hatta, *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Jakarta: LP3ES, 1995).

dapat mengungkap pemikiran ekonomi kerakyatan Moh. Hatta secara utuh. Karya lainnya adalah tulisan Sritua Arif dalam *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*.³¹ Buku ini juga merupakan kumpulan dari artikel yang ditulis oleh banyak orang, di antaranya Mubyarto, Sri Edi Swasono, dan M. Dawam Rahardjo yang mencoba membahas Ekonomi Kerakyatan, sebuah topik yang konsen diteriakkan Moh. Hatta. Namun sayangnya masing-masing artikel yang ditulis oleh masing-masing penulisnya lebih merupakan respon dan tanggapan atas Ekonomi Kerakyatan Moh. Hatta.

Deliar Noer menulis buku *Mohammad Hatta: Biografi Politik*.³² Buku setebal 778 halaman itu sejauh ini merupakan karya yang paling lengkap mengenai Hatta. Buku yang ditulis oleh seseorang yang pernah bersua langsung dengan sang tokoh dan didukung oleh data-data primer ini lebih banyak mengungkap biografi kehidupan Moh Hatta dari sisi politiknya meskipun juga menyinggung tentang pemikiran Ekonomi Moh. Hatta. Begitu juga buku lainnya yang telah di tulis oleh penulis yang sama *Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa*³³ juga hampir sama dengan buku pertama, lebih banyak membahas perjalanan dan kiprah politik Moh. Hatta. Isi buku yang sama juga bisa ditemukan dalam *Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta* karya Mavis Rose.³⁴

Disertasi yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Islam* yang ditulis oleh Anwar Abbas, mahasiwa program doktor UIN Jakarta berusaha menggali pemikiran ekonomi Hatta. Namun, karena fokusnya adalah hanya pada perspektif nilai Islam, penggalian yang dilakukan Abbas hanya

³¹Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia (Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia)*

³²Deliar Noer, *Mohammad Hatta: Biografi Politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

³³Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa* (Jakarta: Djambatan, 2002).

³⁴Mavis Rose, *Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1987).

menyentuh lontaran-lontaran pemikiran Hatta yang lebih bersifat abstrak-filosofis, daripada pemikiran-pemikirannya yang bersifat struktural. Disertasi lainnya adalah *Demokrasi: Pemikiran Politik Mohammad Hatta* yang ditulis oleh Zulfikri Suleman yang ditulis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.³⁵

Kajian yang lebih lengkap terkait pemikiran Ekonomi Moh. Hatta bisa ditemukan dalam disertasi karya Fadli Zon.³⁶ Fadli Zon yang berusaha mengungkap sejarah kemunculan ekonomi kerakyatan Moh. Hatta yang dimulai dari proses awal (biografi sang tokoh meliputi: kelahiran, pengaruh budaya dan adat tanah kelahiran, pendidikan dalam dan luar negeri – termasuk persinggungan sang tokoh dengan gerakan pemikiran dunia yang berkembang saat itu), situasi dan kondisi dalam negeri, perkembangan dunia awal abad 20 sampai bagaimana proses kemunculan ekonomi kerakyatan dan bagaimana posisi dan peranan konstitusi dan regulasi negara di masa sekarang ini dalam “mematri” dan menempatkan koperasi sebagai manifestasi ekonomi kerakyatan itu sendiri. Namun demikian, meskipun dalam temuan disertasi ini juga dinyatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara tradisi Minangkabau yang religius, tradisi Islam (modernitas/pembaharuan) dan tradisi Eropa yang membangun diri Moh. Hatta namun tidak begitu tergambar secara jelas bagaimana dan nilai-nilai Islam apa saja yang terinternalisasi dalam Ekonomi Kerakyatan itu sendiri apalagi di masa sekarang setelah kemunculan koperasi yang menggunakan basis syariah (Kopsyah/BMT) dalam prakteknya. Pun juga disertasi ini hanya menyorot pada temuan adanya faktor penghambat di sektor peranan regulasi dalam operasionalisasi koperasi yang menjadikan koperasi tidak bisa membumi dan berkembang dengan baik. Padahal ada unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam

³⁵Kedua disertasi tersebut telah dibukukan, masing-masing menjadi Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), dan; Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

³⁶Lihat Disertasi Fadli Zon *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926 – 1959)*.

menyingkap dan memperbaiki kondisi tersebut di masa kini yaitu unsur kesadaran pengelola koperasi sendiri dan stakeholder untuk menyadari semangat awal berkoperasi sebagai bentuk perwujudan ekonomi kerakyatan Moh.Hatta yaitu semangat untuk saling membantu sesama sekaligus yang kala itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, imperialisme sebagai buah dari kapitalisme yang disadari atau tidak, kesemuanya tersebut masih terasa keberadaanya meski dalam bentuk dan wujud yang lain.

Dari berbagai kajian yang telah diungkapkan di atas, nampaknya sudah banyak ditemukan kajian dan penelitian tentang pemikiran ekonomi kerakyatan Moh Hatta. Namun sebagai novelty dari penelitian terdahulu, penelitian ini lebih dikonstruksikan untuk mengintegrasikan pemikiran ekonomi kerakyatan Moh Hatta dengan nilai Islam dan relevansinya dalam pengembangan ekonomi di Indonesia saat ini. Meskipun tidak bisa dihindari pada titik-titik tertentu, mungkin isi disertasi ini mempunyai kesamaan dengan karya-karya lainnya. Hal ini memang tidak bisa dihindari dan juga tidak lain agar mendapatkan konstruksi yang lebih lengkap agar fokus kajian utama bisa terjawab dengan komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menelisik kembali gagasan ekonomi kerakyatan Moh. Hatta sebagai obyek bahasan sangat relevan di tengah semangat negara dalam mengupayakan kebangkitan dan kedaulatan ekonomi dengan tetap menjaga kecerikhasan bangsa utamanya bagi akademisi, praktisi ekonomi, ataupun pengambil kebijakan dan pembuat regulasi.

Oleh karenanya, disertasi ini akan mengkaji proses terbentuknya pemikiran (diskursus) ekonomi kerakyatan Moh. Hatta, hubungan nilai-nilai ekonomi kerakyatan

dengan paham ekonomi pada saat itu (awal abad 20) dan Islam sebagai sebuah disiplin *Islamic studies* saat ini serta bagaimana implikasinya terhadap transformasi pembangunan ekonomi nasional. Guna mendapatkan kejelasan dari kajian di atas maka fokus utama dari disertasi ini adalah untuk menjawab:

1. Bagaimana konsep dan cita-cita ekonomi kerakyatan Mohamad Hatta?
2. Bagaimana tinjauan kritis tentang integrasi ekonomi kerakyatan, nilai Islam, dan ekonomi sosialis?
3. Bagaimana urgensi pemikiran ekonomi kerakyatan Mohamad Hatta dalam transformasi pengembangan ekonomi nasional melalui integrasi nilai Islam dan ekonomi sosialis?

C. Kajian Teori (*Logical Framework*)

Sebagai upaya untuk membaca integrasi ekonomi kerakyatan, nilai Islam dan ekonomi sosialis dalam pemikiran ekonomi kerakyatan Moh. Hatta, diawali melalui fenomena dan proses kemunculan, bentuk gagasan (*idea*), formatisasi ide dan praktek gagasan, penulis meminjam teori Pierre Bourdieu mengenai praktik sosial: (*Habitus x Modal*) + *Arena* = *Praktik*.³⁷ Realitas sosial, menurut Bourdieu, merupakan sebuah proses *dialectic of the internalization, of externality and the externalization of internality* (dialektika internalisasi, eksternalitas dan eksternalisasi internalitas).³⁸ Dalam proses interaksi dialektis inilah struktur objektif dan subjektif, antara struktur dan agen, bertemu. Pertemuan itu disebut Bourdieu dengan *praktik*. Berdasarkan rumusan generatif (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik* ala Bourdieurian tersebut,

³⁷Pierre Bourdieu, *Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste*, terj. Richard Nice (UK: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1984), 101. Lihat juga, Richard Harker, Cheelen Mahar dan Chris Wilkes, (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terj. Pipit Maizier (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), 19.

³⁸Bourdieu, *Outline of Theory of Practice*, terj. Richard Nice (Cambridge: University Press, 1997), 72.

penulis kemudian merumuskannya sebagai berikut: *Habitus (Pengetahuan) x Modal (Moh. Hatta) + Arena (Ekonomi Kerakyatan) = Praktik (Sistem Sosialis dan Islamisasi Ilmu)*.

Menurut Bourdieu, *habitus* berkenaan dengan bagaimana seseorang memahami dunia, lingkungan, kepercayaan dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan selalu dibentuk oleh *habitus*, tidak hanya direkam dalam memori seseorang secara pasif.³⁹ Di mata Bourdieu, *Habitus* seorang pelaku koperasi (masyarakat/stakeholders) -misalnya- menjadi fungsi dasar dari bagaimana koperasi harus memproduksi dirinya sendiri. Dalam penelitian ini *habitus* diisi oleh pengetahuan. Berkenaan dengan prinsip *capital* (modal), Bourdieu berpandangan bahwa *modal* merupakan hubungan sosial. Salah satu jenis *modal* yang menjadi pertarungan dalam *field* (arena/ranah) adalah *cultural capital* (modal budaya).⁴⁰ Penelitian ini menempatkan Moh. Hatta sebagai *modal*.

Sedangkan untuk memahami pengetahuan sebagai *habitus* dan Moh. Hatta sebagai *modal*, penulis mengikuti pendekatan historis, yaitu menempatkan pemikiran seseorang dalam konteks sejarah intelektual yang ada. Dalam pendekatan ini, kondisi lingkungan, pengaruh *trend* intelektual dan karakteristik personal membawa seseorang pada pemikiran tertentu.⁴¹ Secara umum, ada lima cabang sejarah, yaitu: *pertama*, sejarah ekonomi (*economic history*); *kedua*, sejarah sosial (*social history*); *ketiga*, sejarah politik (*political history*); *keempat*, sejarah intelektual (*intellectual history*) atau *history of ideas*; dan *kelima* adalah sejarah biografi (*biographical*

³⁹Jen Webb, Tony Schirato and Geof Danaher, *Understanding Bourdieu* (London: SAGE Publication, 2002), 38-42.

⁴⁰Modal kultural adalah salah satu modal dari beberapa modal yang meliputi modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolis.

⁴¹Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), v.

history).⁴² Karena itu, untuk melihat pengetahuan sebagai *habitus* dan sosok Moh. Hatta sebagai *modal*, penulis menggunakan dua pendekatan sejarah yang terakhir, yaitu model sejarah intelektual dan model sejarah biografi. Pendekatan sejarah intelektual dipilih untuk memotret sains, sedangkan sejarah biografi untuk mendapatkan gambaran utuh tentang sosok Moh. Hatta. Sehingga dengan metode pendekatan sejarah ini, penulis dapat membaca apakah Moh. Hatta seorang pemikir derivatif, semata-mata mengulang argumen para pendahulunya, ataukah ia pemikir orisinal yang memberikan kontribusi baru. Christian Troll mengungkapkan pentingnya membaca pemikiran seseorang sebagai hasil proses interaksi antara pemikir tersebut dengan konteks intelektual yang melingkupinya.⁴³

Sedangkan terkait dengan konsep *ranah/arena*, Bourdieu menyebutnya dengan istilah *field*. Ada dua jenis *field* menurut Bourdieu: ranah produksi terbatas (*field of restricted production*) dan ranah produksi skala besar (*field of large-scale production*).⁴⁴ Dalam penelitian ini *ranah* diisi dengan ekonomi kerakyatan. Dalam kacamata Bourdieu, kondisi ekonomi kerakyatan berfungsi sebagai sumber modal kultural yang berkontribusi pada terbentuknya persepsi masyarakat/stakeholders. Selain itu, Bourdieu menjelaskan bahwa jalannya ekonomi kerakyatan secara ideal berperan dalam transmisi ideologi kepada generasi berikutnya.⁴⁵ Konsep ekonomi kerakyatan adalah tempat pengemblengan sikap, mental, cara pandang, kebiasaan, moral dan budaya.

Jika pandangan Bourdieu bisa digunakan untuk menjelaskan peran ekonomi kerakyatan dalam produksi kultur dengan konsep habitusnya, pendapat Althusser bisa

⁴²Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah: Historical Explanation* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 150.

⁴³Christian W. Troll, *Sayyid Ahmad Khan: a Reinterpretation of Muslim Theologi*, (New Delhi: Vikas, 1978), xix.

⁴⁴Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production Essays on Art and Literature* (Cambridge: Polity Press, 1993), 115-131.

⁴⁵*Ibid.*, 198.

digunakan untuk melihat keberadaan ekonomi kerakyatan sebagai alat ideologi negara dalam melanggengkan formasi sosial.⁴⁶ Di samping itu, instrumen ekonomi kerakyatan dalam transmisi ideologi menjadikannya dapat dipahami juga sebagai wilayah pertempuran sekaligus perlawanan pada kondisi saat itu dan embrio dalam terbentuknya Negara RI. Beragam kelompok politik dan sosial menganggap banyak bidang/hal yang bisa digunakan sebagai instrumen penyalur ideologi mereka. Karena itu, mereka berjuang membentuk kerangka sistem ekonomi yang sesuai dengan ideologinya. Melalui pendidikan ekonomi kerakyatan dengan fungsi transmisi ideologi ini menyebabkan kemunculan semangat masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan lain yang bertujuan membentuk formasi sosial yang berbeda. Sejumlah kelompok politik dan sosial berebut membentuk masyarakat yang diinginkannya sesuai dengan pandangan hidup mereka melalui pendidikan. Hal yang sama berlaku di awal kemerdekaan Indonesia, bidang mental dan ekonomi menjadi wilayah perebutan berbagai kelompok untuk membentuk karakter agar sesuai dengan pandangan hidup mereka.

Selanjutnya, untuk membaca praktik *sosial* yang dikerjakan Moh. Hatta, penulis meminjam teori Ian G. Barbour. Pertemuan pengetahuan dan agama, menurut Barbour, memunculkan empat tesis: konflik, independensi, dialog dan integrasi. Adapun pendekatan yang digunakan untuk membaca praktik sosial Moh. Hatta ini, penulis memakai pendapat personal Barbour, meliputi: 1) *reject conflict*, menolak konflik dengan membuang hal-hal yang menjadi sumber konflik, yaitu filsafat materialisme dan teori evolusi Darwin, 2) *start in independence*, dimulai dari independensi sains dan agama, 3) *hold dialogue with certain versions of integration*,

⁴⁶Louis Althusser, *Lenin and Philosophy and Other Essays* (London: NLB, 1971), 124.

mengadakan dialog dengan melakukan integrasi pada hal-hal yang bisa diintegrasikan.⁴⁷

Di samping itu, untuk memahami lebih utuh lagi pemikiran Moh. Hatta tentang pengetahuan dan ekonomi sosialis dan nilai Islam, penulis menggunakan teori wacana dan analisis wacana.⁴⁸ Foucault mendefinisikan wacana sebagai —praktik yang membentuk objek sehingga dapat bicara.⁴⁹ Dalam kata lain, menurut Foucault, wacana membentuk topik, melahirkan objek pengetahuan, mengatur bagaimana sebuah topik layak untuk dibicarakan.⁵⁰ Teori wacana Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan berkelindan dengan kekuasaan. Dalam kata lain, ketika bahasa lekat pada suatu struktur sosial dalam bentuk yang salingtransformatif, maka produk, bentuk dan perubahan konsep tertentu dari pengetahuan kita, berikut maknanya, terkait dengan kekuasaan. Hubungan ini pada umumnya beroperasi dalam tingkatan mikro. Pendekatan ini membantu untuk melihat bagaimana makna, interpretasi dan praktik saling terkait satu sama lainnya. Karena itu dari perspektif teori wacana, tindakan pemberian makna dan konstruksi objek pengetahuan tidak lain bersifat politis.⁵¹

Dalam kerangka ini, penulis menganggap analisis wacana sebagai metode investigasi bangunan sosial suatu fenomena, yang meliputi pemikiran dan wilayah pengetahuan.⁵² Analisis wacana memperlakukan materi empiris dan informasi sebagai

⁴⁷Ian G. Barbour, *When Science Meets Religion* (New York: HarperCollins Publishers, 2000), 36-38.

⁴⁸Untuk pembahasan analisis wacana lihat Michel Foucault, *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (London: Tavistock Publications, 1970); Foucault, *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977* (Sussex: Harvester Press, 1980).

⁴⁹Dikutip D. Howarth and Y. Stavrakakis, —Introducing Discourse Theory and Political Analysis, dalam *Discourse Theory and Political Analysis Identities, Hegemonies and Social Change*, eds. D. Howard, A.J. Norval and Y. Stavrakakis (Manchester and New York: Manchester University Press, 2000), 19.

⁵⁰S. Hall (ed.), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practise* (The Open University: Milton Keynes, 1997), 45.

⁵¹Howarth and Stavrakakis, —Introducing Discourse, 4.

⁵²E. Laclau and C. Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (London: Verso, 1985), 19.

bentuk wacana. Karena itu, beragam data linguistik dan non-linguistik, pidato, laporan, kejadian sejarah, wawancara, kebijakan, pemikiran, bahkan organisasi dan institusi- diberlakukan sebagai *teks* atau *tulisan*. Dalam kata lain, data empiris dilihat sebagai rangkaian praktik yang membentuk sebuah *wacana* dan *realitas*-nya, kemudian memberikan kondisi yang memungkinkan subjek menyelami dunia objek, kata maupun perilaku.⁵³ Karena itu, penulis memperlakukan data empiris yang terkumpul dan data lain yang dihasilkan oleh komunitas (ahli, pelaku, lembaga, dll) tentang praktek yang diidentifikasi sebagai jelamaan dari praktek ekonomi kerakyatan seperti artikel, buku, program siaran, pidato dan wawancara sebagai bahan materi yang membentuk wacana sains dan ilmu pengetahuan serta Islam dalam pemikiran Moh Hatta.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis.⁵⁴ Model pendekatan yang digunakan dalam disertasi ini adalah pendekatan sejarah pemikiran (*history of ideas*), sejarah pemikiran ekonomi yang dihubungkan dengan pendekatan sosiologi historis. Aspek yang dilihat adalah bagaimana struktur sosial dipengaruhi oleh proses sosial. Disiplin ini memang berusaha menggabungkan sosiologi dan sejarah. Dalam penelitian ini akan dipergunakan empat karakteristik, yaitu:

1. Mempertanyakan struktur sosial atau proses sosial yang terbentuk oleh situasi dalam ruang dan waktu;

⁵³Horward and Stavrakakis,*Introducing...*, 4.

⁵⁴ Lihat dalam, C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, (New Delhi: New Age International Ltd. Publisher, 2004)

2. Menunjukkan proses rangkaian waktu dalam melihat hasil;
3. Umumnya hadir dalam keadaan saling mempengaruhi antara tindakan yang berarti dan konteks struktural, untuk memahami yang tak terungkap dari hasil yang disengaja maupun tak disengaja dalam kehidupan individu dan transformasi sosial;
4. Menggarisbawahi bagian khusus dan bervariasi dari struktur sosial yang spesifik dan pola-pola perubahan.

Melalui pendekatan tersebut bisa dilihat bahwa perkembangan pemikiran adalah sesuatu yang dinamis karena sangat terkait atau terikat pada perkembangan masyarakat. Pendekatan analisis sosiologi historis inilah yang digunakan untuk melihat tumbuhnya pemikiran ekonomi kerakyatan Hatta. Penggunaan metode dan pendekatan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, selain dari dimaksudkan sebagai proses pengujian dan penganalisisan secara kritis terhadap rekaman peninggalan masa lampau⁵⁵ dan untuk kemudian membandingkannya dengan fakta yang ada pada era modern. Landasan pemikiran dalam penggunaan pendekatan ini bahwa; *Pertama* untuk mengungkapkan biografi individu secara holistik (utuh) dari sisi bahasa. *Kedua*, berusaha untuk memahami setting historis tentang kemunculan ekonomi kerakyatan dan koperasi Mohammad Hatta. *Ketiga*, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan pelaku terkait dengan isu-isu hubungan antara ekonomi kerakyatan, ekonomi sosialis dan nilai Islam secara *genuine* dan utuh. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif, yakni dengan membandingkan pendapat satu tokoh dengan yang lainnya. Oleh karena itu sumber-sumber data yang diperlukan berasal dari

⁵⁵ Louis Gottschalk, *Understanding History, A Primary of Historical Method* (New York: Alfred and Knoph, 1936), 48.

bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan bidang penelitian ini. Sedapat mungkin data akan dikumpulkan dari sumber-sumber primer yang diperlukan untuk menjamin validitas data. Namun, jika sumber-sumber primer tidak tersedia, sumber-sumber data sekunder akan digunakan dalam penelitian ini.

Secara umum, data yang diperlukan dalam tulisan disertasi ini ada dua macam, *pertama* adalah data primer, yaitu data-data yang di ambil dari subyek penelitian secara langsung yang dapat memberikan keterangan, informasi dan penjelasan secara rinci serta detail tentang fakta kemunculan ekonomi kerakyatan dan koperasi, baik secara sejarah, konsep, teori, dan hal-hal yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah situasi dan kondisi sosial nasional dan dunia yang terjadi saat munculnya ekonomi kerakyatan Moh. Hatta., diantaranya adalah:

- a. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Buku ini ditulis oleh Bung Hatta pada cetakan yang kedua pada tahun 1967, buku ini menceritakan tentang tujuan dari sosialisme yang dikemukakan parasejumlah tokoh barat seperti Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Louis Blanc, Fabian Society, Karx Marx dan Engels. Bung Hatta menjelaskan terkait persoalan ekonomi sosialis dalam konteks ke Indonesiaan yang di dalamnya terdapat semangat nilai-nilai ke-Islaman.⁵⁶
- b. *Beberapa Fasal Ekonomi dan Beberapa Fasal Ekonomi: Jalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960. yaitu buku yang disumbangsihkan pada bangsa ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menemukan arah pemikiran ekonomi Bung Hatta tentang beberapa fasal ekonomi yang mampu memformulasikan dengan gagasan ekonomi sosialis Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*.

⁵⁷Hatta, Mohammad, *Beberapa Fasal Ekonomi*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, CetakanKelima, 1954).

- c. *Ekonomi Terpimpin*, berisikan gagasan Hatta tentang ekonomi terpimpin ditujukan bahwa ekonomi senantiasa tidak menimbulkan kebebasan, namun harus dikelola negara atau para pemimpin guna untuk kesejahteraan masyarakat.⁵⁸
- d. Buku selanjutnya yaitu berjudul “Demokrasi, Bebas Aktif Ekonomi Masa Depan.”⁵⁹
- e. *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- f. *Demokrasi Kita (Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*,
- g. *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*
- h. Dll.

Kedua, *data sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Data ini berasal dari review book, buku, surat kabar, majalah, journal, artikel, bulletin, internet, baik yang terkait erat dengan ekonomi kerakyatan Moh. Hatta, nilai Islam dan ekonomi sosialis ataupun *nash-nash* al-Qur’an, al-hadis dan ijma’ ulama utamanya terkait nilai Islam sebagai pembanding dari pokok permasalahan dan tentang integrasi keilmuan.

Mengingat penelitian ini termasuk dalam *library research* maka data yang telah diperoleh diolah dengan metode penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif-kritis, disamping menggunakan analisa isi (*content analysis*),⁶⁰ yaitu analisis ilmiah tentang isi (pesan) suatu komunikasi. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah analisis terhadap isi suatu data tertulis dari sumber-sumber yang ada untuk kemudian dengan menggunakan metode deskriptif, akan dideskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok-pokok persoalan dan mensistematisirnya sedemikian rupa, yang selanjutnya dengan keyakinan tertentu diambillah kesimpulan umum dari bahan-

⁵⁸ Muhammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Djambatan, 1967).

⁵⁹ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, (Jakarta: UI-Press, 1992).

⁶⁰ *Ibid*, 49.

bahan tentang objek permasalahannya.⁶¹ Dengan demikian, penelitian ini memaparkan data-data tertulis sebagai bahan kajian yang diambil dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang luas dan mendalam. Setelah data-data yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diangkat terkumpul akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan pemahaman general dari keseluruhan penelitian ini, pembahasan dikelompokkan menjadi delapan bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang berkaitan dengan deskripsi sebagai berikut:

1. BAB SATU merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB DUA. berisikan tentang kajian pustaka yang berisi tentang pembahasan ekonomi kerakyatan meliputi biografi dan karya-karya Mohammad Hatta, sejarah dan karakteristik ekonomi kerakyatan. Pada pembahasan tentang ekonomi sosialis meliputi sejarah ekonomi sosialis, tokoh-tokoh ekonomi sosialis dan pemikirannya, prinsip-prinsip ekonomi Sosialis, persoalan-persoalan ekonomi sosialis. Sementara nilai Islam berisikan tentang nilai Islam terdiri dari sejarah Islam dalam aspek ekonomi, tokoh-tokoh Islam dan pemikirannya tentang ekonomi, prinsip-prinsip Nilai Islam persoalan ekonomi dalam Islam.
3. BAB TIGA berisikan hasil temuan tentang rumusan masalah pertama yang terdiri atas konsep dan cita-cita ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 3.

4. BAB EMPAT berisikan hasil temuan tentang rumusan masalah kedua yang terdiri atas tinjauan kritis atas integrasi ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta, nilai Islam dan ekonomi sosialis.
5. BAB LIMA berisikan hasil temuan tentang rumusan masalah ketiga yang terdiri atas urgensitas pemikiran ekonomi kerakyatan Mohamad Hatta dalam transformasi pengembangan ekonomi nasional melalui integrasi nilai Islam dan ekonomi sosialis.
6. Adapun yang terakhir pada BAB ENAM berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang terkait serta implikasinya.